

PERANAN PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN DAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENGATASI MASALAH KEPENDUDUKAN DI INDONESIA

Oleh : Subardhy
Universitas Muhammadiyah Surabaya

ABSTRAK

Masalah kependudukan di Indonesia pada dasarnya bermula pada tingkat kelahiran yang tinggi, yang menyebabkan laju pertumbuhan yang tinggi, yang tidak dapat diimbangi dengan penyediaan kebutuhan hidup berupa pangan, sandang, papan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan lapangan kerja. Kondisi yang demikian menyebabkan sebagian besar penduduk Indonesia kualitasnya masih rendah, dan usaha transmigrasi baik dengan tujuan meratakan penyebaran penduduk maupun sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan hidup penduduk belum membawa hasil yang berarti. Fenomena kependudukan seperti ini harus segera dihadapi dengan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku. Perubahan tingkah laku tidak mungkin terjadi tanpa adanya kegiatan pendidikan. Disinilah peranannya Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) sebagai program pendidikan, yang bertujuan agar anak didik memiliki pengertian, kesadaran, sikap dan perilaku yang rasional dan bertanggung jawab, serta memahami dengan baik tentang pengaruh timbal balik antara penduduk dan lingkungan hidupnya dalam berbagai aspek kehidupan manusia.

Anak didik yang telah mendapat pesan PKLH diharapkan akan menyadari bahwa kelahiran bukan semata-mata karena nasib atau takdir, tetapi kelahiran dapat direncanakan atau dapat diusahakan. Dengan demikian besar kecilnya keluarga bukan semata-mata karena nasib atau takdir, tetapi sesuatu yang dapat direncanakan atau diusahakan pula oleh manusia. Demikian pula anak didik tersebut diharapkan akan menyadari bahwa keluarga kecil adalah keluarga yang wajar dan rasional dalam upaya meningkatkan kualitas hidup diri sendiri dan masyarakat pada umumnya. Anak didik yang mendapat pesan PKLH diharapkan pula akan berperilaku arif dan bijaksana terhadap lingkungan hidupnya, sehingga akan selalu menjaga kelestarian lingkungan hidupnya. Dengan demikian, anak didik yang mendapat pesan PKLH akan menjadi anggota masyarakat yang bersikap positif terhadap norma keluarga kecil (NKK) dan akan melaksanakan norma tersebut kelak pada saatnya mereka berkeluarga. Diterima dan diterapkannya norma keluarga kecil (NKK) berarti tingkat kelahiran akan menurun, laju pertumbuhan penduduk akan terkendali, sehingga pemerintah khususnya dan masyarakat pada umumnya akan mampu menyediakan kebutuhan hidup penduduk baik berupa pangan, papan, sandang,

fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan lapangan kerja. Penurunan laju pertumbuhan penduduk akan menyebabkan pula tekanan penduduk terhadap lingkungan alamnya akan berkurang.

Dengan demikian melalui pesan PKLH akan menjadi keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan penyediaan kebutuhan hidup manusia, yang berarti berbagai masalah kependudukan akan dapat diatasi dengan baik.

Kata kunci : Laju pertumbuhan penduduk, kualitas penduduk, penyebaran penduduk.

ABSTRACT

The population problems in Indonesia basically stems from the high birth rate which causes the high speed of population growth. Unfortunately, this can not meet their life-need supply : food, cloth, houses, facilities for education, health, and employment. Such condition brings low quality of most Indonesian population. In addition, the effort by transmigration to improve prosperity in some extent has not been successful. This phenomenon of population must be anticipated by carrying out an activity which changes this behavior. The behavioral changes can not happen without educational activity. Therefore, PKLH as an educational program to provide children with understanding, awareness, attitude, and rational responsible behavior, and to understand the relationship between population and environment in all of human aspects.

The children who have PKLH education are expected to be aware that birth is not merely a matter of destiny, but it can be planned. Therefore, the family size is not merely destiny, it can be also planned by human being. They are also expected to be aware that a small family is reasonable and rational to improve the quality of social life, and their own life. Children with PKLH are expected to be wise in their development that preserves it. In short, children with PKLH will become society member who have positive attitude toward small family norm and apply it latter in their family. The acceptance and the application of NKK means the decreasing birth rate and the control of population growth. So that, the government and society in general will be able to meet the people life needs : food, cloth, houses, employments, health services, and education. The decreasing of family growth will cause the decreasing of intensity of population against their environment

which seems to be decreased naturally. Through PKLH, the balance population growth and people needs can bring a good solution in their population problems.

Key words: Growth rate of population, population quality, population distribution.

Pendahuluan

Dalam garis besarnya ciri-ciri kependudukan di Indonesia (BKKBN, 1982 :2-3) adalah sebagai berikut :

“Secara kuantitatif kependudukan di Indonesia mempunyai ciri-ciri (a) Jumlah penduduk besar. Secara makro Indonesia menduduki lima besar di dunia. Secara mikro keluarga Indonesia mempunyai anak rata-rata lebih dari tiga orang, (b) Tingkat pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, (c) Penyebaran penduduk yang tidak merata, (d) Komposisi penduduk berusia muda.

Secara kualitatif, kependudukan di Indonesia memiliki beberapa ciri, yaitu: (a) Tingkat pendidikan yang rendah, (b) tingkat kesehatan dan status gizi masyarakat relatif rendah, (c) Pendapatan per kapita masih rendah, (d) Tingkat pengangguran masih tinggi, dan (e) masyarakat Indonesia adalah masyarakat agraris tradisional”

Berdasarkan ciri-ciri di atas, dalam garis besarnya masalah kependudukan di Indonesia terdiri dari tiga masalah utama, yakni (1) pertumbuhan penduduk yang masih tetap tinggi, (2) penyebaran penduduk yang masih tetap tinggi, (2) penyebaran penduduk yang tidak merata, (3) sebagian besar kualitas penduduk masih rendah.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi erat kaitannya dengan timbulnya kemiskinan. Sebaiknya kemiskinan menunjang terjadinya ledakan penduduk. Pertumbuhan penduduk juga menyebabkan pemerintah kesulitan menyediakan fasilitas penyediaan oangan, perumahan, sandang, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan lapangan kerja. Robert Malthus yang datang di akhir abad ke 18 menyatakan bahwa pada dasarnya penduduk yang banyak merupakan penyebab kemiskinan. Hal ini disebabkan laju pertumbuhan penduduk yang mengikuti deret ukur tidak akan terkejar oleh pertambahan kebutuhan hidup penduduk yang hanya mengikuti deret hitung. Terlepas setuju atau tidak setuju terhadap teori Malthus, namun suatu kenyataan bahwa negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia harus berjuang melawan pertumbuhan penduduk yang tinggi dan

kemiskinan yang diakibatkannya, lebih-lebih saat ini akibat krisis moneter yang berkepanjangan. Lester R. Brown (1997:38) menyatakan : kalau laju pertumbuhan penduduk di suatu negara pada tingkat yang tinggi untuk masa yang panjang, maka anak cucu dimasa yang akan datang pasti akan mengalami penderitaan hidup yang luar biasa. Permintaan pangan akan jauh melampaui segala persediaan tanah dan air di dalam negeri, dan menyebabkan kelangkaan yang kronis dan parah.

Pertumbuhan Penduduk di Indonesia.

Ada tiga variabel yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk suatu negara yakni, fertilitas, mortalitas dan migrasi. Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1992 :115) menyatakan : “ Migrasi antar bangsa (migrasi internasional) tidak berpengaruh dalam menambah atau mengurangi jumlah penduduk suatu negara kecuali di beberapa negara tertentu yang berkenaan dengan pengungsian, akibat bencana alam maupun peperangan”. Dengan demikian pertumbuhan penduduk di Indonesia ditentukan oleh selisih angka kelahiran dan angka kematian. Tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia masih tetap tinggi walupun suda ada penurunan secara berarti. Dengan semakin membaiknya tingkat kesejahteraan dan kesehatan penduduk, menyebabkan angka kematian menurun dengan tajam, hal inilah yang menyebabkan tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia tetap tinggi. Jumlah penduduk Indonesia dan angka laju pertumbuhannya tahun 1945-1996 dikemukakan dalam Buku “Statistik Dalam 50 Tahun Indonesia Merdeka (BPS, 1995 : 153) dan Statistik.

Lingkungan Hidup dan Laju Pertumbuhan Penduduk 1945-1995

Tahun	Jumlah Penduduk (juta)	Laju Pertumbuhan penduduk (persen)
1945	73,34	1,02
1950	77,21	2,09
1961	97,06	2,08
1971	119,40	2,32
1980	147,48	-
		1,98
1990	179,38	1,71
1995	195,26	-
1998	204,442	1,53

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk Indonesia jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Penduduk Indonesia dalam tahun 1945 sekitar 73,34 juta dalam kurun waktu 35 tahun menjadi dua kali lipat yakni tahun 1980 menjadi 147,49 juta. Jadi di Indonesia telah

terjadi ledakan penduduk, yakni pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dalam kurun waktu yang sangat singkat. Bila usaha menurunkan angka kelahiran terutama melalui program Keluarga Berencana tidak berhasil maka ledakan penduduk di Indonesia akan berlangsung terus, sebagaimana ditegaskan oleh Maftuchah Yusuf (1985:6).

Di Indonesia dan di negara-negara berkembang lainnya di dunia, penambahan penduduk masih terlalu tinggi untuk dapat diimbangi dengan penambahan kebutuhan hidup. Jika pertambahan penduduk tidak diatur oleh program Keluarga Berencana maka para ahli mengkhawatirkan bahwa penduduk di Indonesia pada tahun 2000 akan berjumlah 281.902.000, yakni dua kali lipat dari jumlah penduduk tahun 1978. Kalau Program Keluarga Berencana berhasil, maka perkiraan pada tahun 2001 nanti jumlah penduduk Indonesia akan berjumlah 219.695.100.

Dari tabel di atas dapat dilihat pula bahwa angka pertumbuhan penduduk terus menurun, yakni pada tahun 1998 1,53% per tahun, sedang jumlah penduduk Indonesia pada tahun itu sekitar 204.353 juta. Namun demikian karena jumlah penduduk Indonesia besar, angka pertumbuhan penduduk sebesar itu masih tinggi.

Laju pertumbuhan penduduk dalam setiap kurun waktu tertentu tidak sama. Dalam kurun waktu 1945-1950 laju pertumbuhan penduduk sekitar 1,03 per tahun. Laju pertumbuhan penduduk ini naik dalam kurun waktu 1950-1961 menjadi sekitar 2,095 per tahun, kemudian turun sedikit antara tahun 1961-1971 menjadi 2,08% per tahun, kemudian naik lagi antara tahun 1971-1980 menjadi 2,32% per tahun. Periode tahun 1945-1950 adalah periode revolusi fisik, kondisi kesejahteraan bangsa Indonesia sangat jelek termasuk kondisi kesehatan masyarakat, karena itu tingkat kematian cukup tinggi. Meskipun angka kelahiran tetap tinggi, tapi karena angka kematian juga tinggi maka laju pertumbuhan penduduk menjadi rendah. Setelah revolusi fisik selesai, yakni mulai 1950 tingkat kesejahteraan dan kesehatan berangsur membaik, menyebabkan angka kematian turun dengan cepat sedangkan angka kelahiran tetap tinggi, akibatnya laju pertumbuhan penduduk terus naik, sebagaimana dikemukakan di atas. Program Keluarga Berencana yang secara nasional dimulai tahun 1968, hasilnya telah dapat dilihat tahun 1980-an laju pertumbuhan penduduk antara tahun 1980-1990 menurun menjadi 1,98% per tahun. Antara

tahun 1990-1993 angka pertumbuhan penduduk turun lagi menjadi 1,77% per tahun. Dalam Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 1998 (BPS, (1999:336), laju pertumbuhan penduduk Indonesia dalam kurun waktu 1997-1998 adalah 1,53% per tahun. Angka-angka laju pertumbuhan penduduk seperti dikemukakan di atas menunjukkan sudah ada penurunan laju pertumbuhan penduduk tiap tahun secara berarti. Namun demikian, walaupun tingkat pertumbuhan penduduk secara nasional sudah menurun secara berarti, namun tingkat pertumbuhan 1,53% per tahun dianggap masih tetap tinggi. Paul R. Ehrlich (1981:9) menghubungkan antara besarnya laju pertumbuhan penduduk dengan waktu yang diperlukan untuk menjadi dua kali lipat jumlah penduduk, yakni sebagai berikut:

Tabel 2
Waktu Yang Diperlukan Untuk Pertumbuhan Dua Kali Lipat

Pertumbuhan Penduduk (%)	Waktu ganda (tahun)
1,0	70
2,0	35
3,0	24
4,0	17

Sebagaimana dikemukakan di atas, penduduk Indonesia tahun 1998, 204,442 juta, maka dengan tingkat pertumbuhan penduduk 1,53% per tahun, jumlah penduduk Indonesia akan menjadi dua kali lipat yakni 408.884 juta hanya dalam waktu 50 tahun, yang akan tercapai sekitar tahun 2050. Jadi walaupun telah terjadi penurunan laju pertumbuhan penduduk yang berarti, namun laju pertumbuhan penduduk Indonesia masih tetap tinggi, akan menimbulkan berbagai masalah kependudukan dan lingkungan hidup yang tak pernah habis-habisnya. Karena itu usaha penurunan laju pertumbuhan penduduk harus terus diintensifkan khususnya melalui penurunan angka kelahiran.

Pertumbuhan penduduk yang cepat menyebabkan komposisi penduduk Indonesia berdasarkan umur merupakan penduduk muda. Menurut Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1985:31) : Dikatakan penduduk muda karena penduduk yang berumur 0-14 sama atau lebih dari 41%. Persentase penduduk yang berumur 0-14% terus menurun dari 43,97 % pada tahun 1871 menjadi 33,54% pada tahun 1995, dan berdasarkan Statistik Kesejahteraan Rakyat 1998, (1999:56), menjadi 28,83 %. Berdasarkan Statistik Dalam 50 Tahun

Indonesia Merdeka (op.cit. :157) sebagaimana dikemukakan dalam Tabel berikut, ada penurunan persentase penduduk yang berumur 0-14 % antara tahun 1971 sampai 1998. Penduduk yang berumur 0-14 tahun pada tahun 1971 tercatat 43,97 % kemudian turun menjadi 28,83 % pada tahun 1998.

Tabel 3
Susunan umur Penduduk 1971-1995 (persen)

Tahun	0-14	15-64	65+
1971	43,97	53,52	2,51
1980	40,84	55,84	3,25
1990	36,49	59,63	3,88
1995	33,54	62,28	4,18
1998	28,83	67,34	3,84 (BPS, 1999:56)

Berdasarkan data di atas, dapat dihitung "angka ketergantungan" atau "dependency ratio" yakni jumlah penduduk yang berumur 0-14 tahun ditambah dengan penduduk yang berumur 65 dan lebih dibagi dengan jumlah penduduk yang berumur 15-64. Tahun 1998 angka ketergantungan penduduk Indonesia adalah $28,83 + 3,84$ dibagi $67,34 \times 100$ sama dengan 48,51 atau 49. Artinya dari 100 penduduk usia produktif menanggung beban 49 orang penduduk usia tidak produktif. Angka beban ketergantungan penduduk tahun 1971 adalah $43,97 + 2,52$ dibagi $53,52 \times 100$ sama dengan 86,86 atau 87. Artinya dari 100 penduduk usia produktif menanggung beban 87 orang penduduk yang tidak produktif. Dengan demikian angka beban ketergantungan tahun 1971 sebesar 87 berubah menjadi 49 tahun 1998, suatu perubahan yang sangat berarti. Menurut Firman Lubis (1982:53) : Untuk negara-negara yang sudah maju, golongan usia kanak-kanak tidak begitu besar yaitu kira-kira 20%, namun golongan usia tua relatif besar yaitu kira-kira 12%, sehingga angka beban ketergantungan sekitar 47. Melihat angka ketergantungan di Indonesia sebesar 49, tidak jauh berbeda dengan angka beban ketergantungan dengan negara-negara yang sudah maju. Namun karena sebagian besar kualitas penduduk Indonesia yang produktif masih rendah dibandingkan penduduk di negara-negara yang sudah maju, maka angka Dependency Ratio sebesar 49 dibagi bangsa Indonesia masih cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang sudah maju, yang berarti masih cukup berat bagi bangsa Indonesia dalam upaya meningkatkan kemajuan dalam bidang sosial, ekonomi penduduknya.

Penyebaran Penduduk

Penyebaran penduduk Indonesia yang tidak merata telah menjadi masalah sejak lama. Sebagian besar penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Ada penurunan persentase penduduk Pulau Jawa dibandingkan dengan seluruh penduduk Indonesia, tetapi penurunan tersebut masih belum berarti. Banyak faktor yang menyebabkan Pulau Jawa menjadi tempat konsentrasi penduduk Indonesia, antara lain dikemukakan oleh Horsman dan Rutz (dalam Sumarto, 1985:8):

Sejak zaman dahulu, konsentrasi penduduk Indonesia adalah di Pulau Jawa. Keadaan seperti ini menurut Horstman dan Rutz disebabkan oleh fungsi dari empat faktor yang menguntungkan bagi kehidupan manusia yaitu kondisi tanah vulkanis yang subur, curah hujan yang cukup, topografi yang datar dan pola pengaliran (drauinage) yang baik.

Perkembangan penyebaran penduduk Indonesia ditunjukkan dalam tabel 3 dari Buku Statistik Dalam 50 tahun Indonesia Merdeka (BPS, 1995: 154) dan Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 1998 (BPS, 1999: 399-400) sebagai berikut :

Tabel 4
Persentase Penduduk yang Tinggal di Pulau Jawa dan Luar Jawa Dan kepadatan penduduk Per Km Persegi 1961-1995 dan tahun 1998

Tahun	Persentase Penduduk		Kepadatan Penduduk		
	Jawa	Luar Jawa	Jawa	Luar Jawa	Indonesia
1961	65,00	35,00	476	19	51
1971	63,80	36,20	576	24	62
1980	61,90	38,10	690	31	77
1990	59,97	40,03	814	40	93
1995	59,07	40,93	868	45	102
1998	58,52	41,49	905	48	107

(Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 1998,1999 : 399-400)

Dari tabel tersebut di atas, dapat dilihat adanya penurunan persentase penduduk Pulau Jawa dari 65 % tahun 1971 menjadi 58,52 % dalam tahun 1998, dan adanya kenaikan persentase penduduk di Luar Jawa dari 35 % tahun 1961 menjadi 41,49 % dalam tahun 1998. Namun demikian penurunan persentase penduduk di Pulau Jawa dan kenaikan persentase penduduk di Luar Jawa belum mampu memperbaiki pola penyebaran penduduk secara nasional. Pola penyebaran penduduk ini mempengaruhi terhadap kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk di Pulau Jawa terus naik. Dalam tahun 1961 tercatat kepadatan penduduk di Pulau Jawa sebesar 476 naik menjadi 905 tahun 1998, lebih dari dua kali lipat kepadatan tahun 1961. Dari Buku Statistik Lingkungan

Hidup Indonesia 18998 (BPS, 1999 : 3999-400) dapat dilihat data sebagai berikut.

Tabel 5
Luas Daerah, Penyebaran Penduduk
Kepadatan dan Laju pertumbuhan Penduduk

Daerah	Luas	% L. In	Penduduk	%Pnd	Kep .Pd	Laju Pr. Pnd
Kalimantan	539.460	28,11	11.226.100	5,49	21	2,46
Maluku & Irian	496.486	25,87	4.303.800	2,11	9	2,01
Sumatera	473.481	24,67	42.209.000	21,14	91	1,74
Sulawesi	189.216	9,86	14.519.600	7,10	77	1,74
Jawa	132.186	6,89	119.630.000	58,52	905	1,32
Bali & Nusa T	88.488	4,61	11.552.700	5,65	131	1,67
Indonesia	1.919.317	100,00	204.442.000	100,00	107	1,53

Dari data di atas, ternyata bahwa ketimpangan penyebaran penduduk di Indonesia belum berubah secara berarti, sebagian terbesar penduduk masih berdomisili di Pulau Jawa.

Kualitas Penduduk Indonesia

Indikator kualitas penduduk berkaitan dengan (1) pendidikan, (2) kemiskinan, (3) kesehatan.

Setelah Indonesia merdeka tahun 1945 pemerintah Indonesia berusaha untuk meningkatkan pendidikan bangsa Indonesia di semua jenjang pendidikan termasuk di dalamnya pemberantasan buta huruf. Menurut catatan "Statistik dalam 50 tahun Indonesia merdeka (BPS, 1995 :177), sebagaimana dikemukakan dalam tabel 6 berikut menunjukkan persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang buta huruf menurut kelompok umur tahun 1961-1994

Tabel 6
Persentase Penduduk berumur 10 Tahun ke Atas yang Buta Huruf Menurut Jenis Kelamin Tahun 1961-1994

Tahun	Laki-laki	Perempuan
1961	44,30%	69,30%
1971	27,91%	49,69%
1980	20,17%	37,23%
1990	10,39%	21,31%
1994	8,13%	17,23%
1998	6,60%	14,46% (BPS,1999:446)

Pada tahun 1961 penduduk yang berumur 10 tahun ke atas yang buta huruf tercatat 57,10%, kemudian menurun cukup tajam menjadi 12,74% dalam tahun 1994. Dapat dilihat pula bahwa persentase kelompok perempuan yang buta huruf lebih besar dari kelompok laki-laki, yaitu tahun 1961 laki-laki 44,30% perempuan 69,30%, dalam tahun 1994 laki-laki 8,13 % dan perempuan sebesar 17,25%. Menurut Statistik lingkungan Hidup 1998 (BPS, 1999 :446), jumlah yang penduduk yang berumur 10 tahun ke atas penduduk yang buta huruf 21,06 %, yaitu laki-laki 6,60% dan perempuan 14,46%.

Statistik Dalam 50 Tahun Indonesia Meerdeka (op.cit: 178) dan menurut Statistik Kesejahteraan Rakyat 1998 (1998:24) menunjukkan persentase penduduk yang berumur

10 tahun ke atas menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan dikemukakan dalam Tabel 7 berikut.

Tabel 7
Persentase Penduduk berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Jenjang Pendidikan Ynga Diatamatkannya

Jenjang Yang Ditamatkan	1961	1971	1980	1990	1994	1998
Belum Tamat SD	19,70	33,25	40,99	31,46	39,32	36,39
Sekolah Dasar	12,40	19,59	20,64	30,36	31,97	32,99
SLTP	2,40	4,38	5,98	10,72	12,16	13,92
SLTA	0,60	2,04	4,35	9,95	12,12	13,75
Di atas SLTA	0,10	0,34	0,49	1,25	1,71	2,95

Dari tabel tersebut sebagian besar penduduk Indonesia tahun 1998 pendidikannya tingkat SD ke bawah, yakni sekitar 69,3871,29% dari seluruh penduduk Indonesia yang berumur 10 tahun ke atas. Yang berpendidikan tingkat SLTP tercatat 13,92% dan yang berpendidikan tingkat SLTA juga sekitar 13,75%. Yang berpendidikan di atas SLTA tercatat hanya sekitar 2,95%. Terdapat peningkatan yang berarti tamatan SD dari 12,40% dalam tahun 1961 menjadi 32,92% dalam tahun 1998. Peningkatan yang cukup tinggi ini antara lain karena di canangkannya wajib belajar 6 tahun, namun hal ini tidak diikuti oleh jenjang pendidikan yang lebih tinggi, ada kenaikan tapi belum menggembirakan, hal ini mungkin disebabkan biaya pendidikan yang cukup tinggi. Data tersebut di atas menunjukkan bahwa pada umumnya pendidikan bangsa Indonesia masih rendah.

Indikator lain tentang kualitas penduduk adalah kemiskinan. Sebenarnya pemerintah telah berhasil menurunkan persentase kemiskinan atau jumlah penduduk yang miskin. Tahun 1980 persentase penduduk miskin mencapai angka 28,6 % atau sekitar 42,30 juta orang kemudian menurun menjadi 11,35 atau sekitar 22,5 juta orang tahun 1996. Namn adanya krisis moneter dan ekonomi yang dimulai sejak pertengahan tahun 1997, jumlah orang miskin pada tahun 1998 bertambah mencapai 79,4 juta atau naik sekitar 37,10 juta orang dari jumlah tahun 1980. Tabel 8 berikut menunjukkan perkembangan jumlah orang miskin di Indonesia.

Tabel 8
Batas Miskin, Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin 1976-1998

Tahun	Batas Kemiskinan (Rp/bulan)		% Penduduk Miskin			Jumlah Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota	Desa	Total	Kota	Desa	Total
1980	6.831	4.449	29,00	28,60	28,60	9,50	32,80	42,30
1984	13.731	7.746	23,10	21,20	21,60	9,30	25,70	35,30
1990	20.614	13.295	16,80	14,30	15,10	9,40	17,60	27,20
1996	38.246	27.413	9,70	12,30	11,30	7,20	15,30	22,50
1998	52.470	41.588	28,80	45,60	39,10	22,60	56,80	79,40

Catatan : Pengeluaran per kapita/bulan
Sumber : BPS 1997, BPS angka perkiraan untuk 1998

Menurut M. Husein Sawit (1999:1) : Di Indonesia saat ini sedang terjadi fenomena kemiskinan masal. Penyebabnya adalah (1) Krisis moneter yang dimulai sejak pertengahan 1997 dan (2) Kemarau panjang akibat El Nino dan akan diikuti oleh banjir akibat La Nina. Lebih Lanjut Husein Sawit (Ibid : 1-3) menyatakan :

“Kemiskinan dan kekurangan pangan : (1) Jumlah orang miskin pada tahun 1998 mencapai 79,4 juta orang (lihat tabel 8) atau 39% dari penduduk Indonesia, pada hal tahun 1996 hanya 33,5 juta orang atau 11%. (2) Jumlah orang miskin meningkat pesat atau bertambah 56,9 juta dibanding dengan tahun 1996, (3) Penduduk miskin di kota meningkat 214% (lebih kecil dari yang terjadi di desa meningkat sebanyak 271%). Jawaban yang masuk akal barangkali banyaknya orang yang berada disekitar garis kemiskinan di pedesaan cukup dominan, sehingga sedikit saja pendapatan berkurang akan menyebabkan penurunan jumlah orang miskin yang lebih banyak, (4) Pengangguran diperkirakan paling banyak terjadi di perkotaan/tutupnya sejumlah besar industri manufaktur serta lumpuhnya sektor pembangunan, (5) Penurunan pendapatan riil masyarakat, (6) Meningkatnya pengangguran dan jumlah keluarga miskin serta keluarga yang kekurangan pangan baik di pedesaan maupun perkotaan (7) Sebagian rumah tangga miskin telah menjual aset yang dimiliki untuk beli pangan, (8) Kalau hal ini terus berlanjut dan tidak ada bantuan pangan dari pemerintah, maka yang paling menderita adalah para wanita hamil serta anak-anak balita dan hal ini akan berdampak serius pada pembentukan SDM di masa yang akan datang, dan (9) Tingginya resiko ketahanan pangan rumah tangga/dominan ditentukan oleh aksesibilitas sebagai akibat meluasnya kemiskinan, pendapatan riil masyarakat menurun tajam, dan bertambahnya pengangguran”.

Indikator lain tentang kualitas penduduk adalah tingkat kesehatan penduduk. Pada umumnya tingkat kesehatan masyarakat Indonesia masih rendah. Hal ini antara lain ditunjukkan masih tingginya angka kematian bayi, masih terbatasnya fasilitas kesehatan, persentase jumlah penduduk yang memperoleh fasilitas air minum bersih (PAM) masih rendah, jumlah kalori yang dimakan oleh setiap penduduk setiap hari masih rendah. Statistik dalam 50 Tahun Indonesia Merdeka (Op.cit., 156) menunjukkan Angka kematian Bayi (AKB)

di Indonesia tahun 1971 – 1994, sebagaimana dikemukakan dalam tabel berikut.

Tabel 9
Perkiraan AKB dan AHH
Menurut Jenis Kelamin, tahun 1971 – 1994

Sumber Data	AKB (per seribu)			AHH (tahun)		
	L	P	L+P	L	P	L+P
SP71 (1967)	158	134	145	44,2	47,2	45,7
SP80 (1976)	118	100	109	50,8	53,7	52,2
SP90 (1986)	79	64	71	58,1	61,5	59,8
1994 Pr	63	50	57	61,2	64,9	63,1
1995 (SUPAS)	57	45	51	-	-	-

Catatan : SP = Sensus Penduduk
Pr = Proyeksi
Tahun dalam tanda kurung = tahun rujukan

Dari angka AKB dan AHH ternyata AKB dan AHH naik terus, yang menunjukkan ada perbaikan atau peningkatan kesehatan. Namun bila dibandingkan dengan AKB di negara-negara yang telah maju, AKB di Indonesia masih sangat tinggi. Ternyata ada korelasi yang positif yang berarti antara AKB dengan GNP per kapita. Makin baik GNP per kapita makin kecil/rendah AKB, sebagaimana dikemukakan oleh Firman Lubis (1982 : 34) pada tahun 1981 : “India AKB-nya 134 dengan GNP per kapita....”

Tabel 10
Persentase Balita Menurut Status Gizi, 186-1992

Status Gizi	Tahun		Daerah Tempat Tinggal	
	1986	1992	Kota	Desa
Baik	48,70	55,53	63,68	52,07
Sedang	37,40	31,42	27,01	52,07
Kurang/Buruk	13,90	13,05	9,31	14,64

Status gizi mengalami peningkatan dari 48,70% menjadi 55,92% pada tahun 1994, masih sekitar 45% yang gizinya belum termasuk baik. Terdapat juga perbedaan status gizi di kota dan di desa, di kota tahun 1992 status gizinya lebih baik yakni sekitar 63,68% sedang di desa sekitar 50,07%. Keadaan ini mencerminkan dari perbedaan tingkat pendidikan dan keadaan sosial ekonomi penduduk serta ketersediaan pelayanan kesehatan antara perkotaan dan daerah kota.

Peranan PK LH dalam Mengatasi masalah Penduduk di Indonesia

Telah dikemukakan di atas, bahwa masalah kependudukan di Indonesia akibat laju pertumbuhan penduduk yang cepat dan tidak diimbangi dengan pertumbuhan penduduk dengan jalan menurunkan angka kelahiran, ialah

melalui program keluarga berencana (KB). Sejak dicanangkannya sebagai program nasional tahun 1968 sampai sekarang, program KB sudah menunjukkan hasil yang berarti, yakni dapat menurunkan laju pertumbuhan penduduk dari 2,52% tahun 1981 menjadi 1,53% tahun 1998. Namun demikian, masalah kependudukan tidak semata-mata masalah teknis medis, tetapi lebih merupakan masalah sosial, yaitu masalah perubahan sikap dan tingkah laku. Sebagaimana dikemukakan oleh Haryono Suyono (dalam Sudjinggo, 1986:44): "Keluarga Berencana bukan semata-mata program penggunaan alat kontrasepsi tetapi merupakan sikap hidup, tata nilai dan norma kehidupan". Pernyataan tersebut sangat tepat sebab melalui penerangan yang intensif, motivasi atau bahkan melalui keseimbangan antara kelahiran dan kematian sehubungan dengan kemampuan manusia dalam memanfaatkan sumberdaya alam dengan tidak merusak keseimbangan lingkungan.

Munculya Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup bukan merupakan jawaban yang langsung dan yang sifatnya menyeluruh dan tuntas terhadap masalah kependudukan. Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup hanya merupakan satu segi saja dari sekian banyak usaha lain yang harus berjalan dengan langkah yang sama dalam mengatasi masalah kependudukan di Indonesia.

Dalam laporan hasil rapat pengkajian pedoman Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup pada tanggal 25-27 Januari 1984 tercantum batasan Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (Depdikbud, *ibid*: 19) sebagai: "Suatu program kependidikan untuk membina anak didik memiliki kesadaran, sikap dan perilaku yang rasional serta bertanggung jawab tentang pengaruh kehidupan manusia. Lebih lanjut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (*Ibid*:23-25) merumuskan tujuan PKLH yang lebih lanjut khusus sebagai berikut : (1) mengembangkan pengetahuan tentang konsep dasar kependudukan dan lingkungan hidup; (2) mengembangkan kesadaran terhadap adanya masalah kependudukan dan lingkungan hidup pada masa kini dan prospeknya pada masa datang; (3) membina kesadaran akan perlunya mengatasi masalah persebaran dan pertumbuhan penduduk serta kemerosotan kualitas lingkungan hidup; (4) mengembangkan pengetahuan dan pengertian tentang hubungan saling mempengaruhi antara dinamika kependudukan dengan budaya sosial

budaya, ekonomi dan teknologi serta kualitas lingkungan hidup; (5) mengembangkan nilai dan sikap positif yang mengarah kepada pembentukan keluarga yang bertanggung jawab, memanfaatkan sumber daya secara rasional, memelihara dan melestarikan lingkungan bagi kehidupan yang lebih baik. (7) mengembangkan partisipasi aktif baik secara individual maupun kelompok dalam kegiatan yang menyangkut usaha peningkatan kualitas hidup melalui usaha penyebaran penduduk secara rasional, pengendalian fertilitas, dan keserasian keseimbangan lingkungan hidup.

Tujuan PKLH yang telah lebih khusus tersebut, dapat dirinci lebih jauh lagi yakni : (1) Tujuan pertama menyampaikan pesan yakni agar anak didik memiliki pengertian yang baik tentang dinamika kependudukan di Indonesia, yakni tentang fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian) dan migrasi (perpindahan penduduk). Ketiga variabel inilah yang menentukan laju pertumbuhan penduduk suatu daerah atau negara. Secara nasional variabel fertilitas dan mortalitas akan menentukan laju pertumbuhan secara nasional. Secara regional disamping variabel fertilitas dan mortalitas, variabel migrasi atau transmigrasi merupakan variabel yang menentukan perkembangan penduduk secara regional. Anak didik diharapkan memahami benar hubungan antara fertilitas dan mortalitas. Sedang konsep dasar lingkungan hidup berkaitan dengan pemahaman tentang ekologi, ekosistem, lingkungan hidup. Menurut Nursid Sumaatmadja (1989:30) : Dalam konteks ekologi terjadi sistem ekologi yang disebut ekosistem yang merupakan jalinan hidup sebagai hasil interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya di suatu tempat atau pada suatu ruang tertentu". Sedang menurut Soedjiran Resosoedarmo (1984:7): "Suatu kawasan alam yang didalamnya tercakup unsur-unsur hayati (organisme) dan unsur-unsur non-hayati (zat-zat tak hidup) serta antara unsur-unsur tersebut terjadi hubungan timbal balik, disebut sistem ekologi atau sering dinamakan "ekosistem". Dengan memahami konsep dasar lingkungan hidup tersebut diharapkan anak didik akan memahami dengan baik bahwa perubahan dalam salah satu unsur lingkungan hidup, akan menimbulkan perubahan pada unsur lainnya, yang bersifat negatif maupun positif terhadap kehidupan manusia. (2) Tujuan kedua menyampaikan pesan agar anak didik memiliki kesadaran tentang adanya masalah kependudukan dan lingkungan hidup serta berbagai faktor yang

menyebabkannya. Masalah penduduk dan lingkungan hidup timbul antara lain karena pertumbuhan penduduk yang cepat yang tidak seimbang dengan pertumbuhan kebutuhan hidup penduduk. Sumber daya alam yang diperlukan untuk mendukung hidup manusia jumlahnya terbatas dan penyebarannya tidak merata, sedangkan pertumbuhan penduduk cenderung terus meningkat dengan cepat. Sebagaimana dikemukakan oleh J.A. Katili (1983: 23-24):

Manusia adalah suatu spesies yang jumlahnya kian bertambah dan membutuhkan sumber daya alam untuk dapat mempertahankan hidupnya. Dalam situasi demikian, sumber daya terbarukan seperti air dan tanah karena pemakaian yang tidak rasional, dapat dengan cepat mencapai taraf dimana dapat dianggap tidak terbarukan lagi.

Sumber daya alam yang dapat diperbahari, bila manusia terus bertambah dengan cepat, akhirnya sumber daya alam tersebut akan sampai kepada kondisi yang tidak dapat diperbaharui. Air dan tanah yang tercemar tidak ada artinya lagi bagi manusia. Kondisi demikian akan menyebabkan tekanan yang berat terhadap lingkungan hidup yang berarti akan terganggunya keseimbangan ekosistem, yang dapat menimbulkan berbagai masalah lingkungan hidup. Laju pertumbuhan penduduk yang cepat, menyebabkan benturan-benturan yang kuat terhadap lingkungan hidup. Anak didik diharapkan menyadari dengan baik bahwa masalah penduduk yang terjadi masa kini adalah kelanjutan masalah penduduk di masa lampau, karena pada masa itu tidak ada upaya mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya masalah penduduk masa kini akan bila tidak ada pemecahan secara baik, akan terus berlanjut di masa mendatang. (3) Pesan ketiga adalah agar anak didik memiliki pengetahuan, pemahaman dan penghayatan tentang masalah penyebaran penduduk di Indonesia, sebab-sebab terjadi pola penyebaran tersebut serta berbagai masalah yang ditimbulkannya. Tujuan ini menyampaikan juga pesan agar anak didik memiliki pengetahuan, pemahaman dan penghayatan tentang masalah penyebaran penduduk di Indonesia sebab-sebab terjadi pola penyebaran tersebut serta berbagai masalah yang ditimbulkannya. Tujuan ini menyampaikan juga pesan agar anak didik memahami dengan baik berbagai faktor yang menyebabkan pertumbuhan penduduk di Indonesia masih tinggi serta akibat-akibat yang ditimbulkannya serta berbagai usaha untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk yang

cepat. Pesan lain yang disampaikan oleh tujuan ketiga ini adalah agar anak didik memahami dengan baik berbagai faktor yang menyebabkan kemerosotan kualitas lingkungan serta usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas lingkungan tersebut; (4) Tujuan keempat memesankan agar anak didik memahami benar bahwa pertumbuhan penduduk yang cepat akan menyebabkan timbulnya berbagai masalah sosial yang tidak diharapkan. Sulitnya meningkatkan kesejahteraan hidup penduduk, dan akan menyebabkan benturan-benturan yang berat terhadap lingkungan hidup; (5) Pesan tujuan kelima antara lain adalah agar anak didik : (a) memiliki pengertian dan kesadaran tentang akibat besar kecilnya jumlah keluarga terhadap situasi kehidupan di dalam keluarga dan masyarakat, (b) memiliki pemahaman dan kesadaran bahwa kelahiran bukan semata-mata karena nasib atau takdir, tetapi merupakan sesuatu yang dapat direncanakan dan diusahakan; (c) memiliki pemahaman dan kesadaran terhadap kenyataan bahwa besar-kecilnya jumlah keluarga bukan semata-mata karena nasib atau takdir, tetapi sesuatu yang dapat direncanakan dan diusahakan; (d) memiliki pemahaman dan kesadaran akibat jumlah keluarga besar terhadap kualitas kehidupan keluarga; (e) memiliki kesadaran bahwa ukuran keluarga kecil sebagai suatu yang wajar dan dikehendaki dan hubungannya dengan kualitas hidup, (f) memiliki pemahaman bahwa keluarga kecil merupakan dasar untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat, (g) memiliki pengertian dan kesadaran mengenai pentingnya dan terbinanya keseimbangan ekologis. (6) Tujuan keenam menyampaikan pesan kepada anak didik; (a) agar memiliki keterampilan untuk membina keluarga yang bertanggung jawab, (b) agar mampu memanfaatkan sumber daya secara rasional, dan (c) mampu melestarikan lingkungan dengan baik. (7) Tujuan yang ketujuh merupakan sasaran akhir dari PKLH, yaitu bahwa anak didik pada akhirnya harus mampu berpartisipasi aktif, baik secara individual maupun secara kelompok dalam menghadapi dalam berbagai masalah kependudukan dan lingkungan hidup. Anak didik berpartisipasi di bidang kependudukan, dengan merencanakan jumlah keluarga secara rasional pada saat mereka tiba waktunya untuk berumah tangga. Diharapkan mereka merencanakan dan mengusahakan hanya mempunyai dua anak saja sepanjang hidupnya atau sepanjang usia suburnya. Di samping itu mereka secara nyata

membantu usaha perataan penyebaran penduduk. Setiap orang diharapkan secara ikhlas jika memang diperlukan bersedia meninggalkan tempat tinggalnya untuk meningkatkan kualitas kehidupannya, dan sekaligus membantu menyelesaikan masalah perataan penduduk secara rasional. Sebaliknya mereka tidak melakukan hal-hal yang berlawanan arah, misalnya pindah ke kota besar yang sudah melampaui daya dukung. Dalam bidang lingkungan hidup, anak didik diharapkan berperilaku nyata dalam mengelola secara bijaksana sumber daya alam yang mereka miliki, tepat guna, hemat dan berorientasi kepada kelestarian dan kemanfaatan bagi kehidupan yang lebih layak dari generasi ke generasi.

Sebagai program pendidikan, maka sumbangan PKLH terhadap pemecahan masalah kependudukan, tidak secara langsung menjadikan anak-anak didik mampu memecahkan masalah-masalah kependudukan tersebut, tetapi PKLH berperan merubah sikap mental anak didik agar memiliki jiwa kritis, obyektif, inovatif yang merupakan kekuatan sosial, kultural, dan psikologis yang menggerakkan pertumbuhan dan perubahan. Dengan demikian, melalui pesan-pesan yang disampaikan PKLH, anak didik kelak diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mendobrak penghalang-penghalang perubahan, meningkatkan mobilitas geografis maupun vokasional, dan memperbesar inovasi-inovasi, khususnya dalam masalah kependudukan dan lingkungan hidup. Sebagai program pendidikan, PKLH memberikan harapan yang besar karena program pendidikan dilaksanakan secara terencana, sistematis, terarah dan terus menerus. Dunia pendidikan berkembang dan maju penuh dengan inovasi, karena di samping berfungsi sebagai lembaga tempat mewariskan norma dan nilai budaya yang baik juga berfungsi sebagai lembaga untuk memperkenalkan dan sekaligus membina norma baru sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan manusia itu sendiri. Karena itu melalui PKLH anak didik diharapkan menjadi anggota masyarakat yang meyakini bahwa keluarga kecil merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup diri, keluarga dan masyarakat pada umumnya. Mereka diharapkan berkeyakinan bahwa keluarga kecil dapat diusahakan, sehingga pada saatnya mereka menerima dan melaksanakan norma keluarga kecil (NKK). Demikian pula melalui PKLH anak didik diharapkan akan merupakan individu

anggota masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap lingkungan hidupnya, akan berbuat dan bertindak terhadap lingkungan hidupnya secara arif dan bijaksana sehingga akan selalu menjaga keseimbangan ekologi menuju keharmonisan dan kelestarian lingkungan hidup yang mantap. Dengan demikian melalui PKLH akhirnya akan terkendali pertumbuhan penduduk yang berarti akan menurunkan laju pertumbuhan penduduk. Turunnya laju pertumbuhan penduduk akan meringankan dalam menyediakan kebutuhan hidup penduduk baik berupa pangan, sandang, papan, maupun fasilitas pendidikan, kesehatan dan penyediaan lapangan kerja. Turunnya laju pertumbuhan penduduk berarti pula tekanan terhadap lingkungan hidup akan berkurang dan akan terjadi keseimbangan dan keharmonisan ekologis. Hal ini berarti akan memudahkan mengatasi berbagai masalah kependudukan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia.

Kesimpulan

Masalah kependudukan di Indonesia pada umumnya berkaitan dengan laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, penyebaran penduduk yang masih timpang dan kualitas sebagian besar penduduk yang masih rendah. Ketiga masalah kependudukan tersebut satu sama lain saling berhubungan dan saling mengokohkan. Laju pertumbuhan penduduk yang cepat terutama di Pulau Jawa akan mempersulit upaya pemerataan penduduk. Jumlah kelahiran setiap tahunnya di Pulau Jawa selalu akan lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk yang dapat ditransmigrasikan dari Pulau Jawa ke berbagai pulau di luar Jawa. Laju pertumbuhan yang masih tinggi menyebabkan pula sulitnya menyediakan kebutuhan hidup penduduk seperti pangan, sandang, papan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, lapangan kerja, berarti akan sangat sulit meningkatkan kualitas penduduk baik secara individual maupun secara kelompok/masyarakat. Kualitas penduduk yang rendah merupakan kondisi yang mendukung laju pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Karena masalah kependudukan di Indonesia bermuara kepada laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, yang diakibatkan oleh tingkat kelahiran masih tinggi, maka harus ada usaha untuk menurunkan dan mengendalikan angka kelahiran. Upaya menurunkan angka kelahiran melalui program keluarga berencana (KB) sudah menunjukkan hasil yang berarti. Namun demikian masalah kependudukan bukan

hanya sekedar masalah teknis-teknis, tetapi lebih merupakan masalah sosial, yaitu masalah perubahan sikap mental dan tingkah laku. Sebagai program kependidikan, kehadiran PKLH sebagai kegiatan yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku, yakni perilaku yang mendukung norma keluarga besar diharapkan berubah menjadi perilaku yang mendukung norma keluarga kecil. Demikian pula pesan PKLH yakni bahwa besarnya keluarga dapat direncanakan, bukan semata-mata ditentukan oleh nasib, diharapkan menjadi keyakinan anak didik. PKLH memesankan pula upaya meningkatkan kualitas hidup pribadi keluarga dan masyarakat umumnya. Pesan lain dari PKLH bahwa anak didik arif dan bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan hidupnya, dan menyadari bahwa semua perilaku terhadap lingkungan alam harus dapat dipertanggungjawabkan, sehingga sumber alam yang terbatas tersebut dapat berlangsung terus mendukung kehidupan dari generasi ke generasi.

Dengan demikian, anak didik yang telah menerima pesan-pesan PKLH sebagaimana dikemukakan di atas, diharapkan anak didik tersebut memiliki sikap positif terhadap norma keluarga kecil (NKK) sehingga pada saatnya mereka berkeluarga akan menerapkan norma keluarga kecil dalam arti mereka akan berusaha hanya mempunyai dua anak sepanjang hidupnya atau sepanjang usia suburnya. Dengan demikian, diharapkan laju pertumbuhan penduduk akan dapat dikendalikan. Dengan terkendalinya pertumbuhan penduduk, maka akan memudahkan dalam usaha mengatasi masalah kependudukan di Indonesia.

Daftar Pustaka

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. (1982). *Pendidikan Kependudukan di Indonesia*, Jakarta : Pusat Pendidikan dan Latihan, 1982

Biro Pusat Statistik, (1995). *Statistik Dalam 50 Tahun Indonesia Merdeka*, Jakarta :BPS

_____, (1999). *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia*, Jakarta: BPS

_____, (1999). *Statistik Kesejahteraan Hidup*, Jakarta : BPS

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1998). *Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup di IKIP dan FKIP*, Jakarta: Depdikbud

Firman Lubis (1982). *Masalah Kependudukan dan Kesehatan Masyarakat*, Jakarta: Bagian Ilmu Kesehatan dan Ilmu Kedokteran Pencegahan. Jakarta, FEUI.

Erlich, Paul P. (1981). *Ledakan Penduduk. Terjemahan : Inyo Fernandes dan Paul Soge*. Jakarta : Penerbit PT Gramedia.

Katili, J.A. (1983). *Sumber daya Alam: untuk Pembangunan Nasional*. Jakarta Ghalia Indonesia.

Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi UI. (1981). *Dasar-Dasar Demografi*. Jakarta : LDFEUI (1983) *Sumber Daya Alam : Untuk Pembangunan Nasional*. Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia.

Sawit, Husein. M. " *Pendekatan Bantuan Pangan Dan Metodologi Evaluasi bantuan pangan*", Disampaikan pada peserta Pra-Penelitian evaluasi OPK yang diselenggarakan oleh Mneg PHOR dan Bulog, tanggal 7 Nopember 1998 di Jakarta.

Maftuchah Yusuf. (1985). *Pengaruh Timbal Balik Antara Kependudukan Dengan Berbagai Aspek Kehidupan Manusia*. Jakarta : FPS IKIP Jakarta & BKKBN.

Sumarto (1985). *Penduduk Indonesia dalam Dinamika Migrasi 1971-1980*, Yogyakarta : Bidang Penerbitan dua dimensi.

Sutisna, Oteng. (1997). *Pendidikan dan Pembangunan : Tantangan bagi Pembaruan Pendidikan*, Jakarta : Penerbit Ganaco NV.